

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

NU masuk ke Medan pada tahun 1950. H. Baharuddin Thalib Lubis adalah tokoh NU yang membawa dan memperkenalkan NU kepada tokoh ulama di Medan. Dalam pertemuan H. Baharuddin Thalib Lubis dengan para tokoh ulama di Medan dicapai kesepakatan untuk mendirikan cabang NU di Medan.

Dalam perkembangannya, banyak ulama Medan yang ikut bergabung ke dalam NU, diantaranya KH. Abdul Majid, Tengku Yafizham, SH., Syaikh Abdullah Afifuddin Langkat, Haji Salam, Haji Muda Siregar, Haji Abdurrahman Jabbar, H. M Jamil Dahlan, Sai Aman Nasution, H. Amiruddin, Bangun Nasution, H. Datok Marajo, M. Rifa'i. Pada 1953, Tengku Yafizham dan Syaikh Afifuddin dan beberapa ulama Melayu lainnya dimasukkan ke dalam kepengurusan NU di Medan. Tahun 1953, sekretariat NU Wilayah Sumatera Utara dipindahkan dari Padangsidempuan ke Medan. Dipilihnya kota Medan, karena Medan merupakan ibukota Sumatera Utara. Dan sebagai Rais Syuriah yang pertama terpilihlah Syaikh Mushtafa Husein.

Struktur kepengurusan NU wilayah Sumatera Utara di Medan pertama kali terdiri dari dewan syuriah, konsulat, penanganan di bidang dakwah, mabarrot, ekonomi dan ma'arif. Dalam perkembangannya, pada tahun 2011, sturuktur organisasi NU terdiri dari Dewan Syuriah, Pengurus Tanfidziyah, Lembaga, Badan Otonom, Lajnah dan anggota. Setelah 122 beberapa perubahan dalam struktur, khususnya dalam perangkat organisasi, lembaga NU di Medan terdiri dari LDNU, LP Ma'arif NU, LPNU, LKK NU dan LAKPESDAM. Badan otonom NU di Medan terdiri dari Muslimat

Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor, IPNU, IPPNU, Jam'iyyah Qurra' wal Huffazh dan Pagar Nusa. Sedangkan lajnah di lingkungan NU di Medan baru Lajnah Falakiah.

Rais Syuriah Pengurus NU Wilayah Sumatera Utara di Medan untuk priode 2007-2012 adalah Prof. Dr. Pagar Hasibuan, sedangkan ketua Tanfidziyah adalah H. Ashari Tambunan. Sedangkan ketua PCNU Medan adalah Ir. Wahid.

Aktivitas NU di Medan di bidang keagamaan dan sosial pada dasarnya bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam berfaham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu, NU merumuskan program-program dalam berbagai bidang yakni dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik.

Dalam bidang keagamaan, kebijakan NU dilaksanakan oleh LDNU, meskipun beberapa lembaga lain atau badan otonom juga terlibat dalam aktivitas keagamaan NU di Medan. Bentuk aktivitas keagamaan NU di Medan dapat dikelompokkan pada penyuluhan, qurban dan peringatan hari besar Islam.

Kebijakan NU dalam bidang pendidikan dilaksanakan oleh LP Ma'arif NU. Perkembangan peran dan aktivitas NU dalam bidang pendidikan tidak sedinamis bidang dakwah. Hingga tahun 2011, NU di Medan hanya memiliki dua lembaga pendidikan yang mengasuh jenjang pendidikan TK hingga tingkat menengah atas. Meskipun NU memiliki rencana untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi, hingga tahun 2011, rencana tersebut belum terealisasi.

Dalam bidang sosial, NU memiliki beberapa lembaga yang melaksanakan kebijakan yakni Lembaga Kesejahteraan Keluarga NU (LKKNU) dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM). Bentuk aktivitas sosial NU di Medan terdiri dari penyuluhan, bantuan korban bencana, hukum dan menggagas beberapa gerakan perubahan dalam bidang sosial.

Dalam bidang politik, NU hanya aktif dalam politik praktis dari tahun 1952-1973. Dalam kurun waktu tersebut, NU di Medan menjadi kekuatan politik yang besar mengingat penduduk kota Medan pada umumnya terdiri dari etnis Melayu dan Mandailing yang merupakan warga NU. NU juga terlibat dalam konsolidasi menghalangi partai PKI dan menumbangkan presiden Soekarno.

Setelah kembali menjadi organisasi sosial keagamaan hingga tahun 2011, NU tidak terlibat secara aktif dalam panggung politik praktis. Keputusan tersebut tetap mendapat tantangan dari berbagai pihak yang menginginkan NU terlibat dalam politik. Akan tetapi sebagai organisasi yang mempunyai basis massa yang sangat besar, kekuatan politik non-praktis NU tetap besar. Dengan kekuatan tersebut, NU berperan dalam pengontrolan dinamika politik di Medan. Keteguhan NU untuk tidak terlibat dalam politik praktis memuncak ketika beberapa oknum PWNU menjual nama NU kepada tim sukses JK-WIN dalam pilpres.

B. Saran-Saran

Terdapat beberapa kesulitan yang penulis alami ketika melakukan penelitian tentang sejarah NU di Medan berkenaan dengan sulitnya mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang sejarah perkembangan NU dikarenakan sulitnya "kurangnya apresiasi" pengurus NU terhadap penelitian tentang NU di Medan. Bahkan beberapa dokumen penting yang seharusnya mudah didapatkan, sangat sulit penulis dapatkan baik dari PWNU ataupun PCNU di kota Medan. Selain itu, dikarenakan kebanyakan PWNU dan PCNU adalah orang-orang yang aktif di organisasi lain maupun di lembaga lain, sangat sulit untuk menemui tokoh elit NU kecuali tokoh tua yang telah pensiun dari aktivitas NU.

Selain kekurangan NU yang disebut diatas, kekalahan NU pada saat ini dengan organisasi Islam lainnya adalah kurangnya manajemen

ditubuh NU. Minimnya arsip-arsip dalam tubuh organisasi ini juga menjadi salah satu kekurangan yang lainnya. Tidak heran bila informasi yang didapat tentang organisasi ini begitu sulit, ditambah lagi apresiasi para pengurusnya yang sangat kurang.

Untuk itu, bagi peneliti yang tertarik dengan masalah NU, penulis memberikan beberapa saran yakni:

1. Untuk menjadikan laporan penelitian ini sebagai informasi awal.
2. Untuk menyediakan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkan informasi dari tokoh-tokoh NU di Medan atau meminta rekomendasi maupun pengantar "sakti" dari pejabat atau tokoh-tokoh yang disegani oleh pengurus NU.
3. Untuk memperdalam kajian literatur sosial-agama-politik di kota Medan, karena sangat sulit mendapatkan informasi, khususnya dalam bidang politik kecuali peneliti terlibat langsung dalam politik praktis atau mempunyai pengantar dari tokoh elit politik.